

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran dan fungsi setiap warga negara berbeda-beda. Dalam negara demokrasi tugas warga negara secara umum ada yang berperan sebagai pemerintah dan ada rakyat yang diperintah. Aristoteles menggambarkan warga negara merupakan orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Orang yang memerintah dan diperintah sewaktu-waktu akan mengalami pergantian peran. Setiap warga negara dituntut untuk bertanggung jawab dalam aktivitas publik. Warga negara yang bertanggung jawab adalah warga negara yang baik, warga negara yang memiliki keutamaan atau kebajikan. Warga negara bagaikan para pelaut yang sedang bertugas disebuah kapal. Dalam melaksanakan tugas mereka, ada yang bertindak sebagai jurumudi, pendayung, pengawas dan lain-lain. Meskipun, mereka berbeda fungsi dan peranan, ada satu tujuan bersama yang hendak dicapai yakni bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran kapal (Rapar dalam Laurensius, 2001).

Sebagai warga negara yang hidup dalam sebuah negara perlu merealisasikan secara penuh potensinya. Dengan kata lain, karena manusia secara alamiah sebagai makhluk politis, mereka dapat memenuhi potensi alamiahnya, menjadi bagian dari anggota komunitas politis dan berperan secara aktif didalamnya. Lewat peran serta dalam bernegara, manusia memanfaatkan kemampuan distingtifnya, yakni akal budi dan berbicara. (Rapar dalam Laurensius, 2001)

Menilai kualitas sumber daya manusia suatu bangsa secara umum dapat dilihat dari mutu pendidikannya. Pendidikan penting untuk meningkatkan kualitas warga negara. Pendidikan saat ini, banyak tenaga pendidik atau guru dalam kompetensi keprofesionalan mengalami penurunan. Selain itu, rendahnya kualitas guru berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

Sedangkan Guru merupakan salah satu tenaga kependidikan yang mempunyai peran penting sebagai salah satu penentu keberhasilan tujuan pendidikan, karena guru yang langsung bersinggungan dengan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien yang muaranya akan menghasilkan lulusan yang diharapkan. Hal ini diperkuat hasil penelitian Knight dan Pearl (2000) yang menjelaskan guru adalah penendang untuk tercapainya tujuan pendidikan itu.

“Education is a political football and the direction it takes depends entirely on who is doing the kicking. Currently, teachers and others who work in public education, including local school boards, are not the kickers; they are the kickees” (Knight dan Pearl, 2000).

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang terdiri dari kompetensi pedagogik yakni pemahaman guru terhadap anak didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan sebagai kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian yakni kemampuan yang dimiliki seorang guru terkait dengan karakter pribadinya. Kompetensi kepribadian dari seorang guru merupakan modal dasar dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Kompetensi sosial yakni suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki guru terkait dengan hubungan atau komunikasi dengan orang lain. Kompetensi profesional yakni kemampuan menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam untuk bahan melaksanakan proses pembelajaran. Dengan menguasai materi, maka diharapkan guru akan mampu menjelaskan materi ajar dengan baik, dengan ilustrasi jelas dan landasan yang mampan, dan dapat memberikan contoh yang kontekstual.

Dalam pendidikan, keberhasilan peserta didik sebagian besar ditentukan oleh guru. Kompetensi guru menjadi faktor yang paling utama dalam keberhasilan peserta didik. Dalam pembelajaran, kompetensi profesional guru yang baik dan sesuai, senantiasa dapat menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan pembelajaran. Guru yang mempunyai kompetensi profesional yang sesuai akan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa secara

optimal. Dengan demikian kompetensi profesional guru yang sesuai merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar siswa.

Kemerosotan pendidikan bukan hanya diakibatkan oleh kurikulumnya tetapi juga kurangnya profesional guru dan keengganan belajar siswa. Dari pendapat di atas terdapat beberapa faktor kemerosotan pendidikan yang di antaranya adalah kurangnya profesional guru, maka seorang pendidik tetap harus dituntut untuk dapat bekerja secara profesional sehingga apa yang menjadi tujuan Pendidikan Nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya dapat diwujudkan (Nasanius, 2012:39).

Masalah kompetensi profesional guru merupakan salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan. Kompetensi profesional merupakan kemampuan, keahlian, kecakapan, dasar tenaga pendidik yang harus dikuasai dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Hamalik, 2004: 34).

Guru mata pelajaran PPKn merupakan guru yang mengampu mata pelajaran PPKn, baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun di Perguruan Tinggi (PT), PPKn merupakan mata pelajaran yang bertujuan atau membicarakan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, disebut juga sebagai mata pelajaran pembentukan kepribadian. Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat (Zamroni dalam Sofhian dan Sahid, 2011:9). Sebagai sebuah mata pelajaran, PPKn juga menuntut profesional guru

dalam mengajar, karena guru dituntut untuk menguasai seluruh aspek kompetensi, baik pedagogik, sosial, kepribadian maupun kompetensi professional.

Realita yang terjadi adalah masih banyak ditemukan guru yang mengajar mata pelajaran PPKn tidak berkompeten dalam melaksanakan pembelajaran, atau lebih tepatnya tidak profesional. Hal ini diperkuat hasil penelitian Hakim (2015) yakni sebagaimana berikut.

The professional competence of teachers is reflected in the level of understanding of teaching materials, the ability to understand concepts and linkages with other sciences, the mastery of the steps in the research and critical analysis to explore the teaching materials and finding solutions to problems faced plays an important role in order improve the quality of learning performance(Hakim, 2015)

Namun pada hasil penelitian Arif (2016) mengenai Pengembangan Kompetensi Profesional Guru SMA/MA Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta yang menunjukkan masih rendahnya presentase pengembangan kompetensi guru.

Pengembangan kompetensi professional guru SMA/MA di Kecamatan Pleret secara umum frekuensi rata-rata persentase keikutsertaan dari berbagai pilihan jenis pengembangan sebesar 19%, termasuk kategori sangat rendah.(Arif, 2016).

Paling umum ditemui adalah ketidak sesuaian rumpun ilmu, artinya, guru yang mengajar PPKn tidak berasal dari lembaga yang khusus mendidik calon guru-guru PPKn, harusnya jika ingin menciptakan pembelajaran yang baik, dan mendapatkan guru yang profesional dalam mengajar, perekrutan guru tidak didasarkan suka atau tidak suka, atau karena alasan yang bersifat subjektif, melainkan atas dasar yang objektif, yaitu kompetensi yang berlaku secara umum untuk semua calon guru. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Arif (2016) yang menunjukkan kompetensi profesional guru SMA/MA di Kecamatan Pleret berdasarkan status sekolah. Sekolah dengan status negeri lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah yang berstatus swasta, dengan frekuensi rata-rata persentase keikutsertaan dari berbagai pilihan jenis pengembangan SMA Muhammadiyah Pleret sebesar 15,5%, MAN Wonokromo Bantul sebesar 21%, dan SMA Negeri 1 Pleret sebesar 19,5%. Sebagai lembaga pendidikan yang

membina guru, punya tanggung jawab dalam pengembangan kompetensi guru, karena kualitas lulusan di sekolah tersebut tergantung pada guru yang mengajar.

Penelitian lain melihat adanya hal positif jika pengembangan kompetensi profesional guru itu dilakukan, hasil penelitian Lubis, dkk (2019) menjelaskan kompetensi profesional guru di Madrasah Aliyah PPQ Al Washliyah Serdang Bedagi sudah memenuhi kriteria yang disebut sebagai guru profesional. Hal ini dapat diukur dari indikator-indikator yang telah dipenuhi oleh setiap guru seperti mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan koprofesional guru melalui wadah yang dikenal dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, media pembelajaran dll. Hal ini diperkuat hasil penelitian Zulfija, dkk (2013) yang menjelaskan sebagaimana berikut.

Our results indicate a lack of professional training of teachers, which in the near future to meet directly with children with disabilities in their own classroom. In these circumstances, it becomes necessary systematic and large-scale training of teachers of general education preschool and school organizations in specific activities in inclusive education, as it is in the process of learning these subjects responsible for the efficiency of the whole educational process (Zulfija dkk, 2013)

Pada dasarnya mata pelajaran PPKn adalah mata pelajaran yang bersifat dinamis. Dalam sejarahnya Pendidikan Kewarganegaraan kita telah mengalami banyak sekali pergantian dan perubahan. Para guru yang sebelumnya mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan selanjutnya akan mulai mengajarkan PPKn. Hal itu merupakan peluang sekaligus tantangan bagi guru PPKn untuk mampu mengembangkan pembelajaran sehingga berhasil sesuai dengan visi dan misi yang diembannya. Dalam kenyataannya PPKn sering dipandang dengan sebelah mata dan diremehkan serta terkesan kurang menarik bahkan dirasa membosankan karena hanya begitu-begitu saja. Fenomena inilah yang harus disikapi dengan serius oleh guru PPKn. Hal semacam ini harus dijadikan tantangan dengan mengembangkan PPKn dari berbagai segi baik itu yang menyangkut proses pembelajarannya, materi, metode pembelajaran, media pembelajarannya dan pengemasannya. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Winaputra (2014) yang menunjukkan bahwa PPKn Indonesia yang kini

bersifat "*minimal*" dan perlu dikembangkan menjadi PPKn yang "Moderat" agar pengalaman belajar yang tercipta sangat potensial mengembangkan karakter warganegara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggungjawab melalui pengembangan aneka ragam "*instructional effects*" dan "*nururanteffects*".

Kurikulum PPKn yang selama ini terkesan terlalu berbasis substansi atau *conten-based*, harus dikembangkan menjadi kurikulum yang berbasis karakter. Orientasi baru diperlukan untuk menghasilkan "*civic intelligence, civic participation, and civic responsibility*" dalam konteks kehidupan demokrasi konstitusional Indonesia. PPKn dalam makna "*citizenship education*" atau "*civic education*" merupakan salah satu alternative pedagogis dan sosio-kultural potensial yang perlu dikembangkan dan ditangani secara profesional, dikembangkan secara terus menerus dengan sinergis antar semua pemangku kepentingan guna memberikan kontribusi yang bermakna dalam mengatasi krisis masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap pengembangan kompetensi profesional pada guru PPKn. Oleh karena itu dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang pengembangan kompetensi profesional pada guru mata pelajaran PPKn di SMP binaan Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pengembangan kompetensi profesional pada guru mata pelajaran PPKn di SMP binaan Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta?
2. Bagaimana kendala dalam mengembangkan kompetensi profesional pada guru mata pelajaran PPKn di SMP binaan Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta?
3. Bagaimana solusi dari kendala pengembangan kompetensi profesional pada guru mata pelajaran PPKn di SMP binaan Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan upaya pengembangan kompetensi profesional pada guru mata pelajaran PPKn di SMP binaan Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta.
2. Untuk mendeskripsikan kendala dalam mengembangkan kompetensi profesional pada guru mata pelajaran PPKn di SMP binaan Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta.
3. Untuk mendeskripsikan solusi dari kendala pengembangan kompetensi profesional pada guru mata pelajaran PPKn di SMP binaan Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai suatu karya ilmiah, maka hasil penelitian diharapkan dapat member kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Memberikan tambahan teori mengenai pengembangan kompetensi profesional guru PPKn.
 - c. Memberikan gambaran pengembangan kompetensi profesional guru PPKn dilingkungan sekolah Muhammadiyah Kota Surakarta.
 - d. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.
2. Manfaat praktis
 - a. Manfaat bagi siswa
 - 1) Meningkatkan semangat belajar siswa dalam proses pembelajaran PPKn.
 - 2) Meningkatkan pemahaman materi siswa dalam proses pembelajaran PPKn.
 - 3) Meningkatkan prestasi siswa dalam proses pembelajaran PPKn.
 - b. Manfaat bagi guru
 - 1) Untuk pengembangan dalam pembelajaran di kelas.

- 2) Untuk pengembangan kompetensi profesional guru PPKn.
 - 3) Untuk memotivasi guru agar mengembangkan keterampilan mengajar sesuai kompetensi profesional dilingkungan sekolah Muhammadiyah.
- c. Manfaat bagi sekolah
- 1) Untuk mengembangkan kompetensi professional guru.
 - 2) Untuk meningkatkan kinerja guru.
 - 3) Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di sekolah.